

Benarkah berita palsu pengaruhi Pilpres AS 2016?

Jumat, 13 April 2018 09:04 WIB



Hillary Clinton and Donald Trump (REUTERS/Carlos Barria/Jonathan)

Jakarta (ANTARA News) - Studi dari Ohio State University mengemukakan berita palsu mungkin saja berperan dalam memenangkan Donald Trump pada Pemilu Presiden Amerika Serikat 2016 lalu.

Studi ini memang belum dikaji ulang oleh peneliti lain, namun, memberi gambaran bagaimana berita palsu mempengaruhi pilihan, dalam kasus ini sekitar 4 persen pendukung Barrack Obama pada 2012 termakan berita palsu sehingga tidak jadi memilih Hillary Clinton pada 2016, demikian siaran berita dari The Washington Post.

Tiga penulis studi tersebut, Richard Gunther, Paul A. Beck dan Erik C. Nisbet memuat tiga berita palsu populer yang beredar pada kampanye 2016 lalu untuk survei YouGov kepada 585 pendukung Obama. 23 persen dari orang-orang yang menjadi sampel itu tidak memilih Clinton, mereka memilih golongan putih atau memberikan suara ke kandidat lain (10 persen memilih Trump).

Ketiga berita palsu yang dipilih adalah Clinton menderita sakit parah (12 persen), Paus Fransiskus mendukung Trump (8 persen) dan Clinton mendukung penjualan senjata untuk kelompok jihadis termasuk ISIS (20 persen).

Seperempat dari para responden mempercayai paling sedikit satu dari berita tersebut,

45 persen dari mereka memilih Clinton. Sementara bagi orang yang tidak percaya ketiga berita palsu tersebut, 89 persen memilih Clinton.

Penelitian ini juga mempertimbangkan faktor lain seperti gender, ras, usia, pendidikan, pandangan politik, serta pandangan personal tentang Trump dan Clinton dengan metode *multiple regression analysis*, mengukur dampak relatif dari berbagai *variable independen*.

Jika digabungkan, semua faktor tersebut memberi penjelasan mengapa 38 persen pendukung Obama membelot dari mendukung Clinton. Sementara mempercayai berita palsu menambah 11 persen.

Bagi mereka yang tidak berbelok dari Clinton, mempercayai berita palsu berdampak lebih besar, para pendukung Obama yang percaya salah satu dari berita tersebut "3,9 kali cenderung membelot dari Demokrat pada 2016 dari pada mereka yang tidak percaya berita palsu sama sekali, setelah dinilai dari semua faktor".

"Kami tidak bisa membuktikan percaya berita palsu menyebabkan mantan pemilih Obama membelot dari kandidat Demokrat pada 2016. Tapi, data ini secara kuat menunjukkan paparan berita palsu memiliki dampak signifikan terhadap keputusan memilih," kata mereka.

Studi lain yang dipimpin oleh universitas Princeton mengenai konsumsi berita bohong selama kampanye 2016 juga menunjukkan artikel palsu mengisi 2,6 persen pemberitaan selama masa tersebut, kebanyakan menjangkau partisan yang mungkin tidak mudah terbujuk.

Baca juga: [Kalimat Hillary Clinton yang bikin heboh Grammy Award](#)

Baca juga: [Hillary Clinton muncul di Grammy, sindir Trump](#)

Baca juga: [Keluarga Donald Trump sewot kenapa Grammy munculkan Hillary](#)

Penerjemah: Natisha Andarningtyas

Mencla-mencle, Trump ingin AS masuk lagi TPP

Jumat, 13 April 2018 08:50 WIB



Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Yuri Gripas)

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memerintahkan para pembantu seniornya untuk mengeksplorasi bergabungnya kembali negara itu dalam Kemitraan Trans Pasifik atau TPP, dengan syarat ada kesepakatan yang lebih baik yang bisa dicapai, kata Gedung Putih seperti dikutip AFP.

Keputusan yang disambut baik para wakil rakyat dari negara bagian-negara bagian pertanian di AS itu bisa menjadi perubahan wajah presiden yang selama ini selalu menentang perjanjian TPP yang dengan cepat mengeluarkan AS dari TPP begitu naik berkuasa tahun lalu.

Gedung Putih buru-buru menepis anggapan bahwa keputusan Trump itu sebagai bukan mencla-mencle, melainkan konsisten dengan pernyataan-pernyataan Trump sebelumnya.

"Tahun lalu, presiden memegang janjinya mengakhiri kesepakatan TPP karena tidak adil terhadap pekerja dan petani Amerika," kata Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Lindsay Walters.

"Tetapi beliau (Trump) konsisten berkata akan terbuka kepada kesepakatan yang secara substansial lebih baik, termasuk dalam pidatonya di Davos belum lama tahun ini," kata Walters.

Trump sudah meminta Kepala Kadin Amerika Serikat Robert Lighthizer dan penasihat ekonomi Larry Kudlow untuk melihat kembali apakah ada kesepakatan yang lebih baik yang bisa dirundingkan, sambung dia.

Trump kerap mencampakkan kesepakatan-kesepakatan perdagangan multilateral, bahkan pernah menyebut Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) yang sudah berumur 24 tahun sebagai "bencana."

Baca juga: [Trump desak Saudi rujuk dengan Qatar](#)

Pewarta: SISTEM

Editor: Jafar M Sidik